

**Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2025-2029**

Visi

TERWUJUDNYA KSB MAJU LUAR BIASA MENUJU TRANSFORMASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMBAWA BARAT

Misi

1. KSB Maju dalam Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Strategi

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Internal Perangkat Daerah
2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel
3. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilhan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
7. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kebijakan

1. 1. Penyusunan perencanaan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu 2. Penyusunan penganggaran yang berkualitas berdasarkan analisis standar belanja dan harga satuan barang 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan kinerja secara berkala 4. Pemanfaatan data capaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. 1. Pemenuhan akan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN perangkat daerah 2. Pelaksanaan pengujian dan verifikasi administrasi keuangan secara terus menerus 3. Koordinasi yang intensif dalam penyusunan dokumen laporan keuangan perangkat daerah
3. 1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah perangkat daerah jangka pendek dan jangka menengah 2. Pengadaan barang dan jasa milik daerah perangkat daerah sesuai kebutuhan mendesak 3. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah secara transparan dan akuntabel 4. Penyusunan laporan barang milik daerah secara berkala 5. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah secara berkala
4. 1. Pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah secara terbuka dan tepat waktu 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai perangkat daerah 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah
5. 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3. Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakan dan Purna Paskibraka
6. 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
7. 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8. 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
9. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
10. 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah 2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	1.1	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	1.1.1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	71,61	72,81	74,01	75,21	76,41
		1.2	Pembinaan Karakter Bangsa berlandaskan Nilai - Nilai Pancasila	1.2.1	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase (%)	100	100			
		1.3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah	1.3.1	Tingkat Partisipasi Pemilih	Persentase (%)	0	0			
				1.3.2	Jumlah Ormas yang aktif	Persentase (%)	70	72			
		1.4	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Daerah	1.4.1	Tingkat Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase (%)	100	100			